STUDI LITERATUR
DINAMIKA SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN

Bromley, R. (1979). Introduction-The Urban Informal Sector: Why Is It Worth Discussing? <u>The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies.</u> R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1031-1032.

Tulisan ini mengkaji relevansi model dualistik kegiatan ekonomi dan usaha yang diterapkan di negara-negara dunia ketiga. Tulisan difokuskan pada asal muasal, difusi, dan kekurangan dari dualisme model formal/informal. Sembilan kekurangan utama telah berhasil diidentifikasi. Kemudian, difusi yang serba cepat terhadap konsep informal terkait dengan ketepatan waktu dan tempat presentasinya, pentingnya institusi-institusi kunci dalam difusi gagasan ini, dan relevansi konsepnya terhadap rekomendasi kebijakan yang mungkin (feasible) atau aman secara politis bagi konsultan dan organisasi-organisasi internasional.

<u>Asal muasal</u>

Diawali dengan pembagian kegiatan ekonomi dan kerja ke dalam sektor tradisional dan modern. Pendekatan dualistik ini telah menjadi dasar teoritis sebagian besar literatur dan hampir dilembagakan dalam analisa-analisa liberal dan neo-klasik ekonomi dunia ketiga. Di awal tahun 1970an, Hart mempresentasikan sebuah makalah tentang kerja perkotaan di Ghana. Dia memperkenalkan istilah baru, membagi ekonomi menjadi 'informal' (perpanjangan dari konsep tradisional) dan 'formal' (kurang lebih sama dengan modern) sektor dan menekankan pada pentingnya kerja sendiri, usaha-usaha kecil, dan tidak adanya catatan statistik sektor informal. Dalam laporan ILO tentang Kenya, sektor informal dan formal dibedakan sebagai berikut. Kegiatan-kegiatan informal adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu yang dicirikan: (1) mudah masuk, (2) bersandar pada sumber daya lokal, (3) usaha milik keluarga, (4) operasi skala kecil, (5) padat karya dan adapted technology, (6) ketrampilan diperoleh diluar sistem formal sekolah, (7) tidak diatur dan pasar kompetitif. Sebagai tambahan informal sektor juga kerap diabaikan, jarang didukung, kadang diatur dan kadang secara aktif dihambat oleh pemerintah.

<u>9 Kekurangan klasifikasi formal/informal</u>

1. Pembagian seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua kategori terlalu simplistis. Pendekatan yang menarik adalah untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha sebagai sebuah kelanjutan antara dua sisi yang berseberangan. Hal ini bisa melihat usaha-usaha yang berada di antara formal/informal dan proses-proses transisi yang terjadi.
2. Model klasifikasi ini tidak mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan yang memiliki sebagian ciri formal dan informal.
3. Banyak pengguna klasifikasi ini berasumsi bahwa dua sektor ini terpisah dan mandiri. Padahal kasus memperlihatkan bahwa kedua sektor ini terus menerus berinteraksi, berbagai bagian dalam sebuah sektor mungkin didominasi atau diciptakan oleh bagian dari sektor lain.
4. Pemberian kebijakan tunggal bagi seluruh sektor informal. Padahal kegiatan usaha di sektor informal sangat beraneka ragam sehingga memerlukan kebijakan yang berbeda-beda.
5. Terdapat kecenderungan melihat sektor informal sebagai kegiatan usaha ekslusif di area perkotaan dan mempergunakan istilah sektor tradisional pedesaan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan di area non-perkotaan. Padahal bukannya tidak mungkin untuk menemukan kegiatan-kegiatan serupa di area pedesaan. Sektor informal pedesaan seharusnya mendapat perhatian yang sama besarnya dengan sektor informal perkotaan.
6. Sebagian besar tulisan yang mendefinisikan dan menggunakan klasifikasi ini tidak berhasil menjelaskan komponen-komponen lain dari keseluruhan sistem nasional yang ada.
7. Sektor informal kerap dianggap tidak memiliki masa depan. Ketika sektor ini didefinisikan dalam pengertian sektor yang kurang mendapat dukungan pemerintah, tidak tercatat secara resmi, dan beroperasi diluar aturan pemerintah, secara otomatis dukungan pemerintah akan diarahkan untuk mengformalisasi sektor ini. Pendekatan ini juga

berasumsi bahwa satu-satunya hambatan sektor informal untuk tumbuh adalah sikap negatif dari pemerintah terhadap sektor ini. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dianggap bisa menjadi jaminan sukses. Hal ini mengabaikan kompetisi yang kompleks dan hubungan tidak seimbang antara usaha kecil dan usaha besar dan berbagai strategi monopoli untuk menekan kompetisi usaha kecil.

8. Pembagian formal/informal tidak dapat diterapkan pada kebanyakan orang yang bekerja di dua sektor pada tahapan yang berbeda dalam siklus hidupnya, sepanjang tahun bahkan sepanjang hari. Demikian juga dalam rumah tangga, ketika sebagian anggota RT kerja di sektor informal sementara lainnya di sektor formal. Patut dipertanyakan juga apakah klasifikasi ini seharusnya diterapkan pada kegiatan (dalam laporan ILO Kenya) padahal kegiatan yang sama bisa dilakukan baik di sektor formal maupun informal. Tampaknya hanya perusahaan yang bisa secara meyakinkan diklasifikasikan kedalam salah satu sektor, dan klasifikasi perusahaan ke deskripsi kegiatan, orang, RT, dan lingkungan pertetanggaan terus menerus membawa pada kebingungan dan kesalahan.
9. Terdapat kecenderungan untuk menyamakan sektor informal perkotaan dengan 'urban poor.' Padahal tidak semua yang bekerja di sektor informal adalah orang miskin demikian juga sebaliknya.

Pentingnya perdebatan mengenai sektor informal

Secara konseptual:

The initial writings on informal sector had so many conceptual errors, inconsistencies and blind spots. Why? The terminology and associated concepts happened to be put forward in propitious places and at propitious times.

Secara praktis:

Banyak orang menganggap validitas intelektual konsep sektor informal kalah penting dibandingkan dampak kebijakannya. Dukungan sektor informal muncul untuk menawarkan kemungkinan "menolong orang miskin tanpa menimbulkan ancaman besar bagi orang kaya."

Mengapa model dualistik formal/informal banyak didiskusikan di tahun 1970an? Ini terkait dengan banyaknya publikasi skala besar dan distribusi hasil-hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan oleh ILO dan penting IDS-Sussex sebagai sebuah pusat penyebarluasan gagasan. Dan yang lebih penting adalah keterkaitan antara diskusi kebijakan sektor informal dengan topik diskusi kebijakan lainnya, seperti "Redistribution with growth", "the Urban Crisis", "Reaching the Poorest of the Poor", dsb.

Hasil identifikasi Bromley terhadap kekurangan dari model ekonomi dualistik sangat penting untuk diperhitungkan sebelum melakukan kajian terhadap ekonomi informal perkotaan.

Bromley, R. (1979). Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called 'Urban Informal Sector': The Street Traders of Cali, Colombia. The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1161-1172.

Tulisan ini mengkaji salah satu jenis pekerjaan jasa (pedagang kaki lima) di Cali, Colombia yang disebut "sektor informal" yang menekankan pada kaitan-kaitan horisontal dan vertikal yang ada, terutama pentingnya penjualan atas komisi (penjual koran, es krim, dsb) dan pekerjaan yang tergantung (PKL yang tergantung pada pemberi kredit/kios). Dua jenis pekerjaan ini berpotensi eksploitasi. Banyak PKL yang tidak lebih daripada karyawan perusahaan besar yang terikat. Mereka bekerja untuk memperoleh keuntungan yang relatif rendah dan berubah-ubah dan banyak menanggung resiko dalam kegiatan-kegiatan yang tidak stabil dan kadang-kadang ilegal (tidak sah). "Para majikan" menghindari keterikatan apapun dengan "para karyawan" itu; menghindari diri dari usaha pemerintah untuk mengatur kesempatan kerja melalui jaminan sosial, jaminan pekerjaan, dan peraturan upah minimum. Meskipun PKL menurut arti harfiahnya adalah perusahaan kecil yang mandiri, namun ia terikat dengan jaringan sosial ekonomi yang rumit. Berhubungan dengan banyak pihak; penyalur, saingan, langganan, pemberi pinjaman, pemberi perlengkapan, petugas pemerintah, dan berbagai pranata resmi maupun privat.

Keberhasilan PKL membutuhkan banyak ketrampilan dan jaringan sosial yang kuat. Sebagian besar PKL tidak berhasil dalam menjalankan dan memperluas usahanya. Permasalahan PKL memerlukan perubahan lebih mendalam dan lebih mendasar daripada hanya sekedar pemberian kredit murah, latihan ketrampilan dan bantuan teknis pada perusahaan-perusahaan sektor informal tertentu yang hanya bisa membantu sejumlah kecil rumah tangga agar menduduki tingkat sosio-ekonomi yang lebih tinggi. Perubahan dalam kaitan-kaitan vertikal masih minim, seperti peraturan pemerintah dan hubungan kelembagaan yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan kecil, keberhasilan sejumlah usaha kecil bisa disertai oleh hancur atau makin lemahnya lebih banyak usaha lain. Setiap kebijakan harus memperhatikan sistem keseluruhan bukan hanya bagian hirarki yang rendah.

Tulisan ini memperlihatkan kompleksitas keberadaan sektor informal perkotaan baik secara horisontal maupun vertikal. Hal ini memperkuat kelemahan pandangan dualisme model ekonomi yang simplistis mengingat banyak usaha di sektor informal yang merupakan kepanjangan dari sektor formal (statusnya sama dengan pekerja borongan pada perusahaan besar). Terkait dengan masalah ini, sisi perburuhan yang jarang mendapat perhatian bisa diangkat dan menjadi bagian penting dari analisa mengenai sektor informal jenis ini.

Firdausy, C. M. (1995). Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima. <u>Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan</u>. C. M. Firdausy. Jakarta, Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.: 139-156.

Tulisan ini membahas dua hal. Pertama model pengembangan sektor informal PKL perkotaan yang diambil dari hasil studi di empat kota (Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya). Model pengembangan ini berupaya untuk mengoptimalkan potensi sosial-ekonomi sektor informal PKL[1] dan mengurangi permasalahan yang ditimbulkannya[2]. Kedua, rumusan kebijakan yang harus ditempuh pemerintah agar model pengembangan PKL dapat mencapai tujuan. Dibagian awal penulis mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi PKL.

<u>Karakteristik PKL</u>:

1. Aspek ekonomi: PKL merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman.
2. Aspek Sosial-budaya: sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di pemukiman kumuh.
3. Aspek Lingkungan: kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.

<u>Permasalahan</u> dibagi menjadi masalah eksternal dan internal. Masalah <u>eksternal</u>: banyaknya pesaing usaha sejenis, sarana dan prasarana perekonomian yang tidak memadai, belum adanya pembinaan yang memadai, keterbatasan mengakses kredit. Masalah <u>internal</u>: kelemahan dalam struktur permodalan, organisasi dan manajemen, keterbatasan komoditi yang dijual, minimnya kerjasama usaha, rendahnya pendidikan usaha dan kualitas SDM. Ciri-ciri dan permasalahan yang dihadapi PKL di empat kota ini tidak banyak berbeda dengan temuan di beberapa studi lainnya (lihat Moir 1978; Sasono 1989; Sethuraman 1989; Ekasari 1993). Hal ini membuktikan bahwa dalam rentang waktu lebih dari 10 tahun, kebijakan dan program pemerintah masih belum mampu mengatasi berbagai masalah yang dialami sektor informal PKL.

---

[1] Mengurangi "surplus of unskilled laborers," alternatif penghasilan bagi penduduk marjinal, dan produsen bagi barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh penduduk berpenghasilan rendah.

[2] Meningkatnya biaya fasilitas-fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus migrasi dari desa ke kota, menjamurnya pemukiman kumuh, dan meningkatnya kriminalitas.

Padahal jumlah PKL dari tahun ke tahun disinyalir terus mengalami peningkatan akibat tingginya angka urbanisasi sementara jumlah penyerapan TK di sektor formal sangat terbatas.

Ketidakberhasilan kebijakan dan program pemerintah dalam mengembangkan PKL terkait dengan berbagai hal, seperti (1) pendekatan pemerintah yang masih bersifat "supply-side" oriented (pengaturan, penataan, dan bantuan terhadap PKL dilakukan tanpa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan PKL sendiri), (2) pelaksanaan kebijakan/program bagi PKL sarat dengan keterlibatan berbagai aparat "pembina," dan (3) penertiban dan pengendalian PKL lebih didasari pada adanya keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan proyek daripada semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat (lihat Sethuraman 1989; Sasono 1989). Hal konkrit yang bisa dilihat akibat berbagai hal tersebut adalah kesulitan PKL untuk mengakses modal/kredit yang disediakan pemerintah, sedikitnya PKL yang pernah mengikuti pembinaan usaha karena kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai program ini, dan penolakan relokasi.

Model Pengembangan Sektor Informal PKL

Berdasarkan berbagai ciri, masalah dan kegagalan kebijakan/program pemerintah dalam menangani PKL tersebut, penulis merekomendasikan model pengembangan sektor informal PKL melalui kerjasama PKL, pihak swasta, dan pemerintah. Inisiatif pembentukan organisasi dalam suatu lokasi usaha datang dari PKL sendiri. Pemberian modal dari pihak swasta dan/atau pemerintah bisa dilakukan melalui organisasi PKL (koperasi, kelompok dagang, dsb) atau secara terpisah kepada PKL yang tidak bergabung ke dalam wadah ini. Kemudian melalui kebijakan PEMDA memberikan perlindungan, pembinaan, dan bimbingan kepada setiap PKL (anggota maupun non-anggota).

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang kondusif menjadi dasar utama agar model pengembangan sektor informal PKL bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Penulis membagi dua level kebijakan yaitu di tingkat makro dan mikro. Kebijakan makro dapat berupa pengakuan dan perlindungan PEMDA terhadap keberadaan sektor ini diperkotaan. Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah merubah iklim kebijakan pemerintah dari yang bersifat elitis menjadi non-elitis kerakyatan. Kebijakan non-elitis dapat diwujudkan dengan dimantapkannya aspek hukum perlindungan bagi keberadaan PKL, perbaikan kelembagaan dan administrasi ke arah non-birokratis dan mempermudah akses PKL terhadap sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Di tingkat mikro diperlukan upaya untuk mengkaitkan produktivitas dan tingkat pendapatan usaha PKL. Cara yang dapat ditempuh: (1) peningkatan efisensi ekonomi dari usaha PKL, (2) peningkatan produksi usaha dagang, (3) meningkatkan usaha PKL yang kurang potensial menjadi usaha yang lebih ekonomis potensial.

Handayani, Suci. (2006). Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif: Sebuah Pengalaman di Kota Solo. Solo, KOMPIP dan The Ford Foundation.

Buku ini mendeskripsikan keterlibatan komunitas sektoral dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di Kota Solo. Hasil temuan dalam buku ini didasarkan pada pengalaman penulis dalam mengikuti dan mendampingi komunitas marjinal sejak tahun 2001-2006. Komunitas marjinal yang dicakup dalam penelitian ini meliputi pedagang kaki lima (PKL), becak, difable (people with different ability), penata parkir, pengamen dan anak jalanan, pedagang pasar, dan pekerja seks komersial (PSK). Mengacu pada definisi sektor informal, berbagai komunitas ini kecuali difabel termasuk dalam sektor informal perkotaan. Komunitas yang dibahas dalam penelitian ini lebih beragam dari penelitian Kompip 2004 yang hanya mencakup PKL, becak, dan penata parkir. Dinamika yang dialami oleh komunitas marjinal dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif cukup baik digambarkan oleh penulis termasuk perbedaan kepentingan antara masyarakat teritorial dan sektoral dan keengganan masyarakat teritorial untuk melibatkan masyarakat sektoral. Sehingga kepentingan masyarakat sektoral jarang tersuarakan di tingkat kelurahan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong tingkat partisipasi kelompok sektoral. Sebagai contoh, adanya Surat Edaran Bersama (SEB) Bapeda yang dianggap bisa membuka peluang komunitas sektoral agar kepentingannya lebih terakomodir oleh kelurahan di wilayah mereka berada. Bapeda juga mendorong komunitas

sektoral untuk melakukan FGD yang hasilnya akan digabungkan dengan komunitas lain. FGD ini difasilitasi oleh LSM pendamping, seperti Kompip Solo yang mendampingi komunitas becak, pengamen dan anak jalanan, serta PKL dan asongan. Selain itu, pemerintah dilarang untuk terlibat dalam proses pembahasan usulan masyarakat. Berbagai hal ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam proses partisipatoris di tingkat masyarakat terutama bagi kelompok marjinal agar berbagai kepentingannya bisa diperhatikan pemerintah kota. Hal ini bisa diindikasikan oleh besarnya anggaran belanja pemkot bagi pengembangan kelompok marjinal. Dalam buku ini, penulis juga menekankan pentingnya proses pelibatan masyarakat marjinal dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif bagi pengembangan kapasitas masyarakat. Melalui proses ini telah terjadi alih dan akumulasi pengetahuan serta meningkatnya perasaan memiliki atas hasil yang diperoleh dan budaya berdiskusi. Buku ini bisa dijadikan salah satu bahan diskusi untuk melihat dinamika partisipasi masyarakat sektoral dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah lokal, khususnya anggaran.

Hart, K. (1991). Sektor Informal. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. C. Manning and T. N. Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 78-89.

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian di Ghana. Penulis memaparkan hasil temuannya berdasarkan dua tipologi kesempatan memperoleh penghasilan di kota, yaitu (1) Formal, melalui gaji dari negara, gaji dari sektor swasta, dan tunjangan-tunjangan pensiun, tunjangan pengangguran. (2) Informal baik yang sah, seperti (a) kegiatan-kegiatan primer dan sekunder, yaitu pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, penjahit, dsb, (b) usaha tersier dengan modal relatif besar, seperti spekulasi barang-barang dagangan, kegiatan sewa-menyewa, dsb, (c) distribusi kecil-kecilan, seperti pedagang pasar, pedagang kelontong, PKL, dsb) maupun tidak sah (jasa: penadah barang curian, pelacuran, mucikari, dsb. Transaksi: pencurian dan perjudian).

Penulis juga menawarkan dua cara melihat sektor informal. Pertama, dari sudut pandang individu sebagai sumber potensial untuk memperoleh penghasilan; kedua, dari sudut pandangan jumlah total pendapatan dan pengeluaran yang mengalir dalam perekonomian kota. Yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah tingkat keteraturan yang memungkinkan keterlibatan dalam kegiatan-kegitan informal. Menurut Hart, “hanya dalam hal keterlibatan yang teratur kita bisa berbicara tentang “lapangan kerja informal” yang berbeda dari arus pendapatan yang tidak tetap. Analisa tulisan ini terbatas pada mereka yang berusaha sendirian ataupun bersama-sama. Temuan penting lainnya dari tulisan ini adalah adanya pemusatan kelompok etnis yang mencegah masuknya orang lain ke dalam perdagangan komoditi tertentu. Lebih dari itu, peranan perdagangan di Ghana (sebagai pekerjaan utama ataupun sambilan) sanggup mendatangkan keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada pekerjaan upahan yang tersedia bagi rakyat miskin di kota.

Dalam tipologi yang dibuat Hart, kegiatan transportasi tidak disebutkan padahal dalam berbagai kasus seperti di Lima, Peru (lihat Hernando de Soto) dan Jakarta, Indonesia (lihat Hugo) sektor transportasi umum didominasi oleh pelaku informal. Selain itu Hart memisahkan secara kaku antara sektor formal dan informal seolah-olah dua kegiatan ekonomi ini berdiri sendiri dan tidak bersinggungan. Padahal banyak usaha-usaha di sektor informal yang merupakan kepanjangan usaha dari sektor formal, seperti pedagang minuman ringan seperti coca cola, es krim, dsb (lihat studi Bromley di Cali, Colombia).

Kompip Solo. and Lab. UCYD. FISIP UNS Solo. (2004). Kajian Implikasi Otonomi Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinal di Kota Surakarta. Solo, Kompip Solo dan the Ford Foundation.

Buku ini mendeskripsikan hasil penelitian mengenai dampak otonomi daerah terhadap keberadaan kelompok marjinal di kota Surakarta. Deskripsi ini didasarkan pada pengalaman pendampingan yang dilakukan Kompip Solo selama kurang lebih tiga tahun (2001-2004) terhadap kelompok marjinal yang tergabung dalam Sompis (Solidaritas masyarakat pinggiran Surakarta). Terdapat tiga komunitas yang menjadi bahasan utama buku ini, yaitu komunitas

becak, pedagang kaki lima, dan parkir yang bisa dikategorikan ke dalam sektor informal. Ketiga komunitas ini memiliki ribuan anggota yang tersebar di berbagai penjuru kota Solo. Masalah utama yang coba dijawab dalam penelitian ini adalah perubahan (positif atau negatif) yang dialami ketiga komunitas tersebut sebelum dan setelah OTDA. Dari hasil-hasil temuan dapat disimpulkan bahwa belum ada perubahan yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat terkait dengan OTDA. Namun OTDA telah mampu mendorong keberdayaan sosial dan politik serta kemampuan mengakses informasi di tingkat kelompok atau komunitas tempat para pelaku ekonomi informal bergabung dengan kata lain mendekatkan kelompok marjinal terhadap para pengambil keputusan di pemerintah kota. Selain itu juga telah terjadi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam era OTDA meskipun belum bisa dipahami dan dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat Surakarta. Kesimpulan lain yang penting dicatat adalah adanya perubahan struktur kelembagaan yang menangani pelaku di sektor informal, misalnya dengan dibentuknya kantor pengelolaan PKL dan dibentuknya sub dinas di DLLAJ untuk menangani masalah transportasi becak. Hanya saja perubahan struktur ini tidak diikuti dengan penyusunan PERDA baru yang lebih sesuai dengan kondisi terkini. Berbagai petunjuk pelaksanaan masih didasarkan pada keputusan Walikota yang dalam proses pembuatannya belum melibatkan kelompok-kelompok marjinal. Kesimpulan terakhir adalah OTDA mampu membuka peluang bagi organisasi atau lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kelompok masyarakat marjinal.

Mazumdar, D. (1991). Sektor Informal di Kota: Analisis Empiris Terhadap Data dari Berbagai Negara di Dunia Ketiga. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. C. Manning and T. N. Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 109-137.

(Dari pengarang). Tulisan ini lebih memusatkan perhatian pada implikasi distribusi pendapatan dalam ekonomi kota yang terbagi atas dua macam pasar tenaga kerja, yaitu sektor formal dan sektor informal. Meskipun belum ada penelitian yang sistematis dalam bidang ini, namun dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada semacam seleksi pekerja dalam sektor informal. Sebagian pekerja dalam sektor ini tidak termasuk dalam kelompok usia kerja 25-50 thn, kebanyakan wanita dan berpendidikan rendah.
2. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sektor informal memainkan suatu peranan penting untuk melicinkan jalan masuk ke pasar tenaga kerja di kota bagi kaum migran baru.
3. Rendahnya penghasilan dalam sektor informal sebagian disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi tipe angkatan kerja dalam sektor ini. Bagaimanapun, hal ini tidak dapat digunakan sebagai suatu argumen untuk menolak pendapat bahwa pembagian pasar kota atas sektor formal dan informal cenderung memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan di kota. Sepanjang kelompok pekerja mendapat kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dengan upah lebih tinggi, mereka cenderung menekan harga penawaran (upah) dan pendapatan dalam sektor informal.
4. Terdapat perbedaan yang besar dalam sektor informal, dan pada kelompok-kelompok penting dalam sektor ini. Perbedaan dalam sektor ini perlu dijadikan suatu topik penelitian lebih lanjut. Pada saat ini, kita tidak tahu berapa banyak orang dalam sektor ini mengalami mobilitas dan meningkatkan penghasilannya.
5. Efek kumulatif dari berbagai bukti yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya mitos populer bahwa sebagian besar massa berpenghasilan rendah terdapat dalam kantong-kantong ekonomi kota tertentu-sektor informal, pekerja usaha sendiri, atau kegiatan tersier yang perlu ditolak. Khususnya, suatu proporsi yang sangat kecil dari angkatan kerja di kota mempunyai tingkat penghasilan yang sama dengan atau lebih rendah dari tingkat penghasilan kaum miskin di desa.

Moser, C. N. (1979). Informal Sector or Petty Commodity Production: Dualism or Dependence in Urban Development? The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1041-1064.

Melalui tulisan ini, Moser menawarkan kerangka teori "petty commodity production" (PCP) dan hubungannya dengan sektor kapitalis sebagai alternatif dari konsep sektor informal (model dualisme ekonomi) yang digunakan oleh program-program studi World Employment ILO. Model dualisme ekonomi ternyata tidak mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan produktif berkelanjutan yang banyak ditemukan di negara berkembang dan keterkaitan yang kompleks dan hubungan ketergantungan antara sistem produksi dan distribusi. Kerangka teori PCP yang didasarkan pada elaborasi teori-teorinya Marx ditawarkan untuk mengisi kelemahan dari model dualisme ekonomi. PCP diidentifikasikan sebagai sebuah cara transisi dari cara feodal dan non-kapitalis lainnya, dan cara produksi kapitalis dengan perbedaan utama terletak pada "cyclical movement of productive forces in the former as against the revolutionary development of the latter" (p.1057). Dalam cara produksi kapitalis, petty commodity production memiliki fungsi penting namun karena posisinya yang tergantung maka akan mengalami berbagai hambatan dan keterbatasan dalam mengakumulasi kapital. Oleh karena itu, pendekatan petty commodity production melihat hubungan antara usaha besar dan kecil sebagai hubungan yang eksploitatif. Kelompok pendukung pendekatan ini menyarankan peningkatan otonomi petty commodity producers dan pemutusan hubungan dengan usaha kapitalis besar. Moser berargurmen bahwa pendekatan yang terfokus pada kaitan struktural dan hubungan antara sistem produksi dan distribusi yang berbeda lebih memiliki kekuatan untuk menjelaskan dibandingkan model dualisme. Pendekatan ini juga dianggap bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami usaha kecil ketika melakukan perluasan usaha, tingkat akumulasi kapital, dinamika produksi, dan proses transisi baik menuju produksi kapitalis atau pemiskinan usaha.

Pena, S. (1999). "Informal Markets: Street Vendors in Mexico City." Habitat International 23(3): 363-372.

Artikel ini menganalisa peran dan fungsi institusi informal, yaitu organisasi pedagang jalanan di Mexico City dan pentingnya keberadaan mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Hasil temuan memperlihatkan dua fungsi utama dari organisasi pedagang jalanan: (1) organisasi sebagai perunding (negotiators) atau pembuat kesepakatan (deal-makers); para pedagang jalanan memutuskan untuk menjadi anggota sebagai sebuah cara untuk mengatasi masalah atau birokrasi yang kompleks. Organisasi adalah sebuah cara yang efisien bagi pedagang untuk memenuhi atau menghindari berbagai persyaratan agar bisa beroperasi di jalan, seperti ijin dan pajak. Melalui organisasi ini, pedagang sebagai kelompok dapat mengatasi berbagai persoalan yang sulit dihadapi seorang diri. (2) organisasi sebagai pengelola (managers) aset sosial; organisasi ini berperan dalam membatasi keanggotaan dan akses terhadap pasar informal serta mengatasi konflik di antara para pedagang. Pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan konflik antar anggota. Untuk memperoleh berbagai manfaat ini, anggota wajib membayar iuran dan menghadiri *rally* untuk mendukung calon dari the Revolutionary Institutionalized Party (PRI). Jika seorang pedagang tidak menghadiri *rally,* pemimpin organisasi bisa melarang pedagang tersebut untuk berjualan selama satu hari atau lebih. Iuran dipergunakan untuk menyogok dan memberikan hadiah pada aparat pemerintah serta untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan publik di lingkungan tempat mereka bekerja. Tulisan ini juga melihat pentingnya peran sosial kapital, keluarga, teman, dsb bagi pedagang jalanan setiap kali akses terhadap pasar informal dalam masalah.

Penulis mengidentifikasi tiga pilihan untuk mengatasi masalah pedagang jalanan. Pertama, negara harus menjadi institusi kunci dalam mengatur pedagang jalanan. Hal ini mengikuti pandangan Portes yang percaya bahwa keberadaan negara sangat penting dalam proses pembangunan. Kedua, mengikuti De Soto, organisasi pedagang jalanan dibiarkan untuk terus mengatur kegiatan mereka sendiri. Ketiga, menyarankan pemerintah dan pedagang jalanan untuk menegosiasikan ruang-ruang aksinya. Dalam kasus Mexico City, pemerintah memegang peran kunci (mendekati pilihan pertama) dengan merelokasi dan melakukan kontrol ketat terhadap para pedagang jalanan. Pemerintah kota menerapkan sebuah program (Street

Commerce Reordering Program) di tahun 1996. Program ini terfokus pada dua isu: (1) membantu pedagang jalanan untuk beralih dari jalan ke tipe bangunan pasar yang disebut Plazas. (2) Kontrol ketat dari pemkot melalui pengeluaran ijin bagi pedagang jalanan untuk menjalankan kegiatannya. Dengan mengeluarkan ijin, pemerintah berupaya untuk menciptakan hubungan langsung dengan para pedagang dan mengabaikan keberadaan organisasi pedagang jalanan. Padahal studi ini memperlihatkan pentingnya keberadaan organisasi pedagang jalanan. Oleh karena itu, di masa mendatang pemerintah perlu memikirkan cara agar organisasi pedagang jalanan dapat berpartisipasi dan meningkatkan proses reorganisasi bersama-sama dengan pemerintah.

Rachbini, D. J. and A. Hamid (1994). <u>Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua</u>. Jakarta, LP3ES.

Buku ini coba mendeskripsikan berbagai hal yang terkait dengan sektor informal perkotaan di Indonesia. Diawali dengan penjelasan mengenai permasalahan dasar ekonomi informal yang bersifat struktural, seperti ketidakseimbangan antara luas tanah dan jumlah penduduk dan buruknya pola kepemilikan tanah, peningkatan jumlah penganggur, menguatnya kekuasaan kaum minoritas termasuk orang asing dalam pedagangan dan investasi, dan adanya dualisme sosial, ekonomi, dan teknologi. Buku ini juga menjelaskan dualisme ekonomi yang melihat keterpisahan dari satu sistem menjadi dua bagian (tradisional-modern, formal-informal), yang berinteraksi secara tidak seimbang. Dalam bagian dualisme ekonomi ini penulis mengangkat analisa dari Boeke, Hyla Mynt, dan Michael Todaro.

Hasil temuan studi ini memperlihatkan bahwa berkembangnya sektor informal perkotaan tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya arus migrasi desa-kota sebagai akibat dari model pembangunan yang bias perkotaan. Bagi para migran sirkuler lebih mudah mencari pekerjaan di kota dan penghasilannya pun relatif lebih banyak. Studi LP3ES memperlihatkan, ojek sepeda, yang dianggap pekerjaan yang paling marjinal, ternyata bisa memberikan penghidupan yang lebih baik. Sektor informal juga mengalirkan dana tambahan ke desa dan menambah dinamika kehidupan ekonomi pedesaan. Hasil penelitian Hugo dan Helter memperlihatkan bahwa penghasilan kaum miskin di pedesaan meningkat setelah kepala keluarganya bermigrasi kekota dan mendapatkan pekerjaan di sektor informal. Mereka mengirimkan sebagian pendapatannya ke desa. Sehingga ekonomi informal perkotaan bisa dianggap sebagai bagian dari ekonomi pedesaan. Penulis juga berasumsi bahwa keterlibatan dalam sektor informal lebih akibat keterpaksaan daripada pilihan (Hugo) karena tekanan dari sistem ekonomi yang tidak memberi tempat bagi mereka yang kurang berpendidikan dan ketrampilan (p. 57).

Terkait dengan partisipasi politik, pelaku sektor informal lebih dianggap sebagai obyek ketimbang partisipan. Padahal mereka merupakan sumber daya politik dan ekonomi. Sebagai sumber daya politik, mereka kerap dijadikan obyek yang dikendalikan oleh organisasi massa yang berafiliasi dengan partai pemerintah. Melalui cara ini, pemerintah melakukan kontrol terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik dan masalah keamanan. Oleh karena itu, kaum informal hampir tidak pernah bisa memanfaatkan sumber daya politiknya. Sedangkan sebagai sumber daya ekonomi terkait dengan ketersediaan tenaga kerja yang murah. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk eksploitasi. Sebagai perbandingan, buku ini meringkas temuan-temuan penting dari penelitian Hernando De Soto di Peru. Sekitar 60% perekonomian Peru merupakan ekonomi informal bahkan 95% transportasi umumnya merupakan kegiatan ekonomi informal. Penelitian De Soto didasarkan pada beberapa asumsi: (1) ekonomi informal yang dilakukan secara ilegal merupakan cerminan dari kemiskinan dan marjinalisasi, (2) Situasi kebudayaan yang mewakili situasi pedesaan tidak sesuai dengan semangat ekonomi dan kewirausahaan di negara-negara maju, (3) Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara di Amerika latin lebih diakibatkan oleh kesalahan yang diciptakan oleh kekuatan luar bukan semata kesalahan internal. Penelitian De Soto memperlihatkan bagaimana ekonomi informal bergerak dan berkembang di suatu negara. De Soto juga melihat sektor informal sebagai kunci yang menyebabkan keadaan ekonomi di suatu negara mengalami kemandekan yang kemudian dianggap sebagai pemecahan dari macetnya ekonomi masyarakat.

Studi ini difokuskan pada sektor perdagangan dan jasa informal, seperti usaha di kakilima, pedagang dan jasa informal keliling dan asongan, mengingat usaha informal ini paling banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah dan yang paling fenomenal. Berusaha di sektor informal banyak dilirik karena minimnya prosedur resmi, minim modal, dan potensi keuntungan relatif besar. Dari berbagai jenis dagangan dan jasa usaha informal dapat dibedakan berdasarkan asal produk (produksi pertanian, pabrik, dan rumah tangga) dan cara menjajakannya (menetap, menetap bongkar pasang, dorongan keliling dan asongan). Bagian terakhir buku ini menjelaskan tentang perubahan sosial ekonomi di pedesaan untuk memahami meningkatnya proses migrasi ke kota.

Studi ini kurang menjelaskan latar belakang para pelaku sektor informal selain daerah asal (untuk menjelaskan berkembangnya sektor informal sebagai akibat meningkatnya migrasi desa-kota). Untuk konteks ekonomi thn 2000an penting untuk melihat latar belakang ekonomi dan pekerjaan (mis: buruh pabrik) mereka mengingat terjadinya perubahan besar dalam proses produksi dan model kerja di sektor formal terutama industri manufaktur yang menjadi lebih fleksibel sebagai akibat meningkatnya kompetisi ekonomi global. Sehingga berpartisipasi di sektor informal bukan hanya dilakukan di masa senggang pertanian seperti yang banyak dilakukan migran sirkuler tahun 1980-90an tapi juga sebagai masa menunggu dipekerjakan kembali di pabrik.

Sethuraman, S. V. (1991). Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. C. Manning and T. N. Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 90-108.

Dalam tulisan ini sektor informal dianggap sebagai sebuah manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Kegiatan memasuki usaha kecil di kota lebih ditujukan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Mereka yang terlibat sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil, dan kebanyakan adalah para pendatang. Berdasarkan hal ini, penulis menyarankan agar sektor informal dipandang sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan input modal dan pengelolaan yang besar. Penulis menyatakan bahwa konseptualisasi sektor informal tersebut belum dapat menyelesaikan masalah definisi. Masih diperlukan beberapa definisi untuk menentukan batas sektor ini, baik dari sudut pandang operasional maupun penelitian. Ciri penting untuk membedakan sektor informal dari semua kegiatan ekonomi sektor-sektor lainnya adalah skala operasi. Alat ukur yang tepat untuk mengukur skala operasi adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk kepentingan tulisan ini, penulis mengklasifikasikan unit-unit usaha yang melibatkan 10 orang ke bawah ke dalam sektor informal.

Pertanyaan Panduan

1) Definisi sektor informal dan implikasi dari definisi – kaitan dengan definisi yang closely related dan implikasinya terhadap sektor dan cara pandang kita, juga program-program/kebijakan untuk sektor informal

2) Kenapa sektor informal masih penting untuk dilihat?

3) Ketika bicara tentang sektor informal – tipologi orientasi problem solving ke mana (formalisasi, penggusuran)

4) Konteks Negara berkembang – konteks Indonesia – dan desentralisasi/reformasi. Apa yang berubah dari proses yang berubah.

5) Hubungan antara sektor informal dengan actor2 lain (ekonomi kota yang lain, pemerintah, partai politik, mediating institution yang lain)